

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN  
DAN KESEHATAN, INFLASI DAN KEMISKINAN TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI  
VARIABEL MODERATING DI INDONESIA**

**A. Mahendra**

Universitas Katolik Santo Thomas Jl. Setia Budi No.479 F, 20132, Indonesia

e-mail : [mahendraroshan7@gmail.com](mailto:mahendraroshan7@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research is intended to know the influence of government expenditure on education and health sector, inflation, and poverty on human development index with economic growth as a moderating variables in Indonesia. Population in this research is Indonesia and 20 of them were selected to be the samples for this research through purposive sampling technique. Estimates conducted by the multiple regression analysis. The data that were used in this study were secondary data, consisted of Government Expenditure, Inflation, and Poverty to human development index for the year 2000-2019. The results of this research, that Based on the partial test (t test), the Poverty variable has no significant effect while the Inflation and Government Expenditure variables have a significant effect on the variables of the human development index in Indonesia, the simultan test (F test), government expenditure, inflation, and poverty have a significant effect on the variables of the human development index. The economic growth variables are unable to moderate the relationship between government expenditure, inflation and poverty on the human development index.*

**Keywords:** *Government Expenditure, Inflation, Poverty, Economic Growth, Human Development Index*

**PENDAHULUAN**

Pembangunan secara tradisional dapat diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama menuju peningkatan pendapatan nasional bruto atau GNI (gross national income) tahunan (Todaro, 2006 : 19). Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat secara berkelanjutan dalam jangka panjang (Sadono, 2010 : 11).

Indeks pembangunan manusia kemudian menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat pentingnya IPM antara lain adalah IPM merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) serta IPM dapat menentukan peringkat atau tingkat pembangunan suatu wilayah/negara (BPS, 2015).

Perekonomian Indonesia mengalami kemajuan dari tahun 2001 ke tahun 2009, walaupun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini perekonomian nasional sering dihadapkan pada masalah krisis perekonomian dunia. Tingginya tingkat pertumbuhan nasional saat ini tidak dibarengi dengan menurunnya tingkat kemiskinan dan rendahnya tingkat pembangunan manusia. Menurut BPS tingkat kemiskinan di Indonesia pada saat tahun 2008 mencapai hingga 15,42% padahal tingkat pertumbuhan ekonomi ada di level 6,38% yang cenderung mengalami trend positif disaat terjadinya krisis ekonomi global. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan yang tinggi tidak dibarengi dengan penurunan tingkat kemiskinan (BPS, 2009).

Selain itu, Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dan kaya akan sumber dayanya dan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi bahkan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani pertumbuhan ekonomi

Indonesia termasuk tertinggi di dunia namun perkembangan IPM nya belum memuaskan. Pasalnya dari tahun-ketahun IPM Indonesia masih berada pada angka 60. Ini menandakan bahwa Indonesia masih tergolong menengah/ sedang. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius (Rizki, 2017). Laju indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia tidak secepat pertumbuhan ekonomi. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk.

Pengeluaran pemerintah dapat digunakan juga sebagai cerminan dari kebijakan yang diambil pemerintah dalam satu wilayah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting yang menunjang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya dijadikan sebagai prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya yang tercermin dari IPM adalah investasi pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan, yang diharapkan dapat berpengaruh pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dapat mengurangi kemiskinan (David dan Nasri, 2015).

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan dari pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan kesejahteraan dan pendidikan merupakan hal yang wajib dalam mencapai kehidupan yang layak dan berharga, dalam hal ini baik pendidikan atau kesehatan, kedua-duanya merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti dari makna pembangunan (Todaro, 2003). Apabila proporsi anggaran belanja modal rendah akan dapat memperlambat proses pembangunan ekonomi, sehingga perekonomian daerah dimungkinkan akan tergantung pada belanja rutin pemerintah yang memiliki tingkat efektifitas yang rendah.

Inflasi adalah kenaikan harga barang kebutuhan pokok rumah tangga secara terus menerus. Data kenaikan harga-harga kebutuhan pokok ini dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang kantor-kantor cabangnya ada di daerah provinsi sampai ke kecamatan. Indikator inflasi ini dibuat oleh para ahli yang disebut dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Sedangkan Indonesia tingkat rata-rata inflasi setahun sebesar 8,5% dalam periode yang sama. (BPS, 2015). Mengapa demikian? Salah satu sebabnya adalah Indonesia mengimpor bahan bakar minyak, sehingga harga bahan bakar naik dan tidak lagi disubsidi oleh pemerintah. Harga bahan bakar yang naik ini menyebabkan biaya transportasi naik (seperti : angkot, bis, taxi, dan transportasi lainnya). Akibat meningkatnya biaya transportasi maka harga sayur mayur, harga daging sapi, ayam mengalami kenaikan. Karena inflasi meningkat, maka tingkat kesejahteraan menjadi terganggu, yakni daya beli masyarakat menurun. Kesejahteraan masyarakat ini diukur dengan indeks kesejahteraan rakyat yang dinyatakan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) (Indah dan Rudi, 2018).

Variabel lain yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia selain Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi adalah Kemiskinan. Kemiskinan akan menghambat individu untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang dapat mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu daerah (Christina, 2011).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Inflasi, dan Kemiskinan memberi pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini berarti anggapan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Inflasi, dan Kemiskinan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi

Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2000 sampai dengan 2019 dapat diterima secara umum.

Dari uraian diatas serta pemikiran diatas, maka penulis merasa terdorong untuk mendalami dan meneliti tentang analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan , inflasi dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating di indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Indeks Pembangunan Manusia**

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR) (Badan Pusat Statistik).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Manfaat dari Indeks Pembangunan Manusia antara lain :

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pada tahun 2010 terjadi perubahan metode perhitungan indeks pembangunan manusia. Perhitungan indeks pembangunan manusia metode lama menggunakan angka rata lama sekolah, angka melek huruf, angka harapan hidup serta PDB per kapita, kini di ganti dengan angka rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, angka harapan hidup serta PNB perkapita.

### **Pengeluaran Pemerintah**

Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran, yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggran defisit. Dalam pengertian umum, anggaran berimbang adalah suatu kondisi dimana penerimaan sama dengan pengeluaran ( $G = T$ ). Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan ( $G < T$ ) sedangkan anggaran defisit adalah anggaran dimana komposisi pengeluaran lebih besar daripada penerimaan ( $G > T$ ). Anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi sedangkan anggaran defisit digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sampai dengan tahun 2004, rincian belanja pemerintah pusat masih terdiri dari: (1) pengeluaran rutin dan (2) pengeluaran pembangunan. Namun sejak tahun 2005 mulai diterapkan penyatuan anggaran (*unified budged*) antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (Nur Khoiriyah, 2013).

### **Kebijakan Anggaran Pemerintah Terhadap Pendidikan dan Kesehatan**

Pengalokasian anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bagian yang terpenting dalam kebijakan anggaran (Rosen dalam Brata: 2005). Kebijakan ini dikaitkan peran pemerintah sebagai penyedia barang publik. Dampak eksternalitas (eksternalitas positif) dari kebijakan pengalokasian anggaran untuk kedua bidang tersebut tentunya diharapkan berpengaruh pada peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan bila anggaran yang digunakan sesuai dengan yang diharapkan.

#### Inflasi

Dalam kajian ilmu ekonomi, kenaikan harga-harga secara umum merupakan suatu proses yang dinamakan dengan inflasi, dimana juga berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan dari berbagai faktor, seperti adanya konsumsi masyarakat yang selalu meningkat, serta berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan terdapat spekulasi, sampai termasuk adanya ketidak lancarannya proses pendistribusian barang. Inflasi dapat diklasifikasikan menjadi empat golongan, antara lain inflasi yang ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan dapat terjadi apabila adanya kenaikan harga yang berada di bawah garis angka 10% satu tahun; inflasi sedang antara 10%-30% satu tahun; berat antara 30%-100% satu tahun; dan hiperinflasi atau nama lainnya yaitu inflasi yang tidak terkendali terjadi jika kenaikan harganya berada di atas 100% setahun. (Wikipedia; 2011)

#### Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan (Renggapratiwi, 2009).

Kemiskinan merupakan masalah yang muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers dalam Suryawati (2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis.

#### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 1999 : 8). Pengertian tersebut mencakup tiga aspek, yaitu : proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan gambaran ekonomi pada suatu saat. Mencerminkan aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Dalam hal ini berkaitan dengan output total (GDP) dan jumlah penduduk, karena output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output perkapita harus dianalisa dengan melihat apa yang terjadi dengan output total disatu pihak, dan jumlah penduduk di pihak lain. Dengan perkataan lain, pertumbuhan ekonomi mencakup pertumbuhan GDP dan pertumbuhan penduduk.

### **Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah dengan Indeks Pembangunan Manusia**

Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara tetapi tidak didasari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan. Pendidikan dan

kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat intrinsik. Pendidikan dan kesehatan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat instrumental (Lanjouw, dkk 2001:112). Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Seperti diungkapkan oleh Meier dan Rauch dikatakan pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan (Cliff dkk, 2015).

#### **Hubungan antara Inflasi dengan Indeks Pembangunan Manusia**

Inflasi menunjukkan arus harga secara umum (Samuelson, 1992). Inflasi sangat terkait dengan penurunan kemampuan daya beli, baik individu maupun perusahaan. Secara historis inflasi Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, seperti Thailand, Malaysia, dan sebagainya. Negara-negara ASEAN mengalami inflasi antara 3% sampai 5% pada periode tahun 2005-2014. Sedangkan Indonesia tingkat rata-rata inflasi setahun sebesar 8,5% dalam periode yang sama. (BPS, 2015). Mengapa demikian? Salah satu sebabnya adalah Indonesia mengimpor bahan bakar minyak, sehingga harga bahan bakar naik dan tidak lagi disubsidi oleh pemerintah. Harga bahan bakar yang naik ini menyebabkan biaya transportasi naik (seperti : angkot, bis, taxi, dan transportasi lainnya). Akibat meningkatnya biaya transportasi maka harga sayur mayur, harga daging sapi, ayam mengalami kenaikan. Karena inflasi meningkat, maka tingkat kesejahteraan menjadi terganggu, yakni daya beli masyarakat menurun. Kesejahteraan masyarakat ini diukur dengan indeks kesejahteraan rakyat yang dinyatakan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) (Indah & Rudi, 2018).

#### **Hubungan antara Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia**

Tingkat kesehatan dan pendidikan dapat mempengaruhi kemiskinan. Perbaikan di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, dan anak-anak usia sekolah dapat bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang selanjutnya menyebabkan produktivitas meningkat dan pendapatannya juga meningkat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat yang kemudian akan menyebabkan tingkat kemiskinannya berkurang. (Siti, 2018). Terdapat hubungan penting antara IPM dan kapasitas pendapatan produktif. Pendapatan merupakan penentu utama dan hasil dari pembangunan manusia. Orang miskin menggunakan tenaga mereka untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi kemiskinan akibat kurangnya pendidikan, serta gizi dan kesehatan yang buruk mengurangi kapasitas mereka untuk bekerja. Dengan demikian, akibat rendahnya IPM adalah orang miskin tidak dapat mengambil keuntungan oportunitas pendapatan produktif karena terjadinya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penyediaan pelayanan sosial dasar merupakan unsur penting dalam penanganan kemiskinan (Kanbur dan Squire, 1999).

### **METODE PENELITIAN**

#### **Populasi dan Sampel**

Menurut Arikunto (2010) bahwa populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Inflasi, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di

Indonesia. Sampel adalah sebahagian atau wakil dari populasi yang menjadi objek penelitian. Sampel dalam penelitian adalah Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Inflasi, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dari periode kuartalan tahun 2000 sampai 2019.

### Operasionalisasi Variabel

Variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengeluaran Pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui berbagai macam program.
2. Inflasi merupakan besarnya perubahan harga-harga secara umum pada periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan persen
3. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah.
4. Pertumbuhan Ekonomi adalah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu domestik atau agregat.
5. IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni adalah Pengeluaran Pemerintah, Inflasi, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dalam kurun waktu 2000-2019.

### Metode Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*Mutiple Regresion Analysis*) dan uji residual untuk moderating variabel. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Sosial Science*). Analisis regresi berganda bermaksud untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen bila dihubungkan dengan dua atau lebih variabel independen. Untuk menguji variabel moderating dipilih menggunakan uji residual. Dengan persamaan regresi berganda pada model I dan uji residual pada model II.

Model I Analisis Regresi Linear Berganda :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \quad \dots\dots\dots(1)$$

Model II Uji Residual :

$$Z = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e \quad \dots\dots\dots(2)$$

Persamaan (2) bertujuan untuk menguji pengaruh deviasi (penyimpangan) dari suatu model.

$$|e| = b_0 + b_5 Y \quad \dots\dots\dots(3)$$

Persamaan (3) bertujuan untuk menguji apakah variabel sanksi bisa dikatakan sebagai variabel moderating.

Dimana :

Y	: Indeks Pembangunan Manusia
$\alpha$	: Intercept
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	: Koefisien regresi
X1	: Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan
X2	: Inflasi

X3 : Kemiskinan  
 Z : Pertumbuhan Ekonomi  
 | e | : Nilai residual mutlak

### Uji Hipotesis

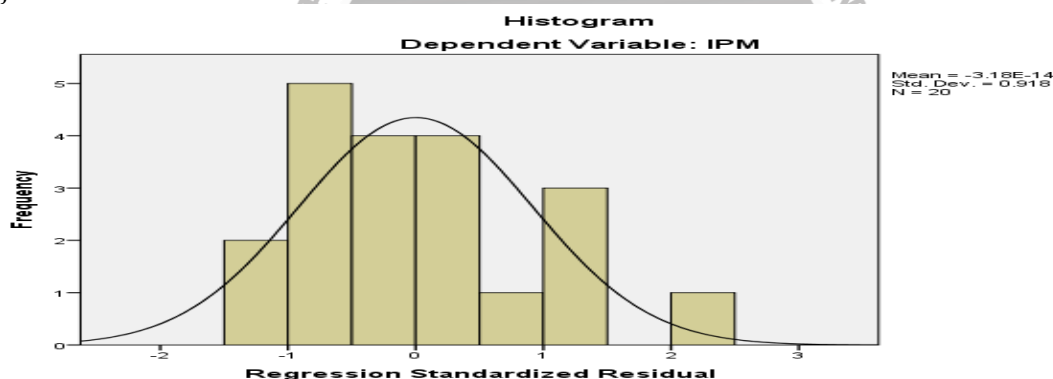
Pengujian Hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji-F)  
 Menurut Suharyadi serta Purwanto (2011:225), uji-F dimaksudkan supaya dapat melihat kemampuan secara menyeluruh dari variabel bebas dapat atau mampu menjelaskan tingkah laku serta keragaman variabel terikat.
2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji-t)  
 Menurut Suharyadi serta Purwanto (2011:228), uji signifikansi parsial digunakan untuk menguji apakah adanya suatu variabel bebas memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Uji Normalitas



**Gambar 1. Uji Normalitas**

Berdasarkan hasil olahan SPSS, dapat dilihat bahwa distribusi data normal dan memenuhi asumsi normalitas. Hal ini terlihat dari garis yang dibentuk terlihat memiliki bentuk lonceng.

**Tabel 1 Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan	.676	1.480
	Inflasi	.664	1.505
	KEMISKINAN	.970	1.031

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan keempat variabel independen Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Inflasi, dan Kemiskinan tidak terjadi multikolinearitas karena nilai *tolerance* ketiga variabel independen berada di atas 0,10 dan nilai VIF ketiga variabel independen berada di bawah 10.

**Tabel 2 Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Durbin-Watson
-------	---	----------	---------------

1	.920 <sup>a</sup>	.847	1.000
---	-------------------	------	-------

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1.000; sedangkan dalam tabel DW untuk "k" = 4 (variabel bebas dan variabel terikat) besar nilai dl (batas bawah) = 0,9976 dan du (batas atas) = 1,6763; 4 - du = 2,3237 dan 4 - dl = 3,0025. Dengan melihat kriteria pada pedoman *Durbin-Watson* 1.000 < 1,6763 maka hasil *test* Uji Autokorelasi tidak terjadi autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

Regresi linear Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Inflasi, Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

Untuk mendapatkan hasil regresi antara variabel independent (Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Inflasi dan Kemiskinan) dan variabel dependen (Indeks Pembangunan Manusia) maka digunakan data sekunder yang berasal dari BPS yang dicatat mulai dari tahun 2000-2019 dan diolah dengan menggunakan bantuan program komputer. Berikut ini hasil pengolahan data dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*).

**Tabel 3 Hasil Regresi**

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.876	.188		41.819	.000
	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan	-.119	.019	-.728	-6.121	.000
	Inflasi	.006	.003	.277	2.313	.034
	Kemiskinan	.002	.002	.097	.981	.341

a. Dependent Variable: IPM

Dari hasil regresi diatas, dapat dibentuk model hasil estimasi sebagai berikut :

$$Y = 7,876 - 0,119 X_1 + 0,006 X_2 + 0,002 X_3$$

### **Pengujian Koefisien Regresi Secara Individual (Uji t Statistik)**

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Untuk variabel pengeluaran pemerintah diperoleh nilai t-hitung sebesar -6,121 dengan nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0,000. Dengan demikian  $H_a$  diterima, karena nilai probabilitas lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dan - t-hitung > - t-tabel ( $-6,121 < -1,746$ ). Berarti dapat disimpulkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh nyata (signifikan) terhadap variabel indeks pembangunan manusia di Indonesia dengan pengujian pada tingkat kepercayaan 95 % ( $\alpha = 5\%$ ).

Inflasi

Untuk variabel Inflasi diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,313 dengan nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0,034. Dengan demikian  $H_a$  diterima, karena nilai probabilitas lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0,05 ( $0,034 < 0,05$ ) dan - t-hitung > t-tabel ( $2,313 > 1,746$ ). Berarti dapat disimpulkan bahwa variabel Inflasi berpengaruh nyata (signifikan) terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dengan pengujian pada tingkat kepercayaan 95 % ( $\alpha = 5\%$ ).

Kemiskinan

Untuk variabel Kemiskinan diperoleh nilai t-hitung sebesar 0,981 dengan nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0,341. Dengan demikian  $H_0$  diterima, karena nilai probabilitas lebih besar dari nilai  $\alpha$  0,05 ( $0,341 > 0,05$ ) dan t-hitung < t-tabel ( $0,981 < 1,746$ ). Berarti dapat disimpulkan bahwa variabel Kemiskinan tidak berpengaruh nyata (signifikan).

terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dengan pengujian pada tingkat kepercayaan 95 % ( $\alpha = 5\%$ ).

Pengujian Koefisien Regresi Secara Bersamaan (Uji F Statistik)

**Tabel 4. Uji Anova**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.069	3	.023	29.554	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.013	16	.001		
	Total	.082	19			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Inflasi

Berdasarkan hasil output program spss, diperoleh nilai F-hitung sebesar 29,544 dengan nilai probabilitas (signifikansi) adalah sebesar 0,000. Dengan demikian  $H_a$  diterima, karena nilai F-hitung > F-tabel ( $29,554 > 3,24$ ) dan nilai probabilitas (signifikansi) lebih besar dari nilai  $\alpha$  0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Berarti dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (Pengeluaran Pemerintah), variabel X2 (Inflasi) dan variabel X3 (Kemiskinan) berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) pada tingkat kepercayaan 95 % ( $\alpha = 5\%$ ).

Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 5 KOEFISIEN DETERMINASI**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.920 <sup>a</sup>	.847	.818	.02797

a. Predictors: (Constant), Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Inflasi

Berdasarkan hasil output program spss, dapat dilihat nilai R-square adalah sebesar 0,847 yang berarti bahwa variabel X1 (Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan), X2 (Inflasi) dan X3 (Kemiskinan) secara bersama-sama mampu memberikan penjelasan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia sebesar 84,7 % sedangkan sisanya 15,3 % dijelaskan oleh variabel baru yang tidak disertakan dalam estimasi model.

Hasil Uji Moderating (Uji Residual)

Uji Residual dilakukan untuk melihat apakah variabel moderating dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji residual motivasi (Z) dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan Tabel 5.6 berikut ini.

**Tabel 6 Uji Residual Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.390	5.783		.586	.566
	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan	1.037	.595	.466	1.744	.100
	Inflasi	.004	.078	.013	.046	.964
	Kemiskinan	-.047	.075	-.140	-.629	.538

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

**Tabel 7 Hasil Uji Residual Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-12.595	21.031		-.599	.557
	IPM	1.678	2.802	.140	.599	.557

a. Dependent Variable: AbsRes\_1

Berdasarkan hasil uji residual pada tabel 6 dan Tabel 7 diperoleh persamaan regresi moderasi sebagai berikut :

$$Z = 3,390 + 1,037 X_1 + 0,004 X_2 - 0,047 X_3 \dots\dots\dots 1)$$

$$| e | = -12,595 + 1,678 Y \dots\dots\dots 2)$$

Suatu variabel dikatakan memoderasi jika *P-Value* (Sig) < 0,05 dan nilai koefisien parameternya negatif. Berdasarkan Tabel 5.6 hasil uji residual menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,557 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  ( $0,557 > \alpha = 0,05$ ) dan nilai koefisien positif yaitu (1,678) maka dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Inflasi, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan kata lain variabel Pertumbuhan Ekonomi bukan variabel moderating dalam penelitian ini (H5 tidak dapat diterima).

## PEMBAHASAN

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada hasil penelitian diperoleh variabel pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20 % dari APBN untuk bidang pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Fahmi, 2018). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astri et al (2013).

### **Pengaruh Inflasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Pada hasil penelitian diperoleh variabel Inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Inflasi merupakan gejala ekonomi yang menghantui perekonomian setiap negara. Hal ini disebabkan karena dampaknya yang luas, seperti golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap akan menderita (berkurang kesejahteraannya). Karena harga bahan baku menjadi meningkat maka pengusaha akan menderita juga. Pemerintah juga menemui kesulitan untuk meningkatkan pajak karena tenaga kerja dan produsen sama-sama menderita dan menurun kesejahterannya (Pangesti, 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Manik, 2013).

### **Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Pada hasil penelitian diperoleh variabel kemiskinan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Ketidak signifikansi kemiskinan terhadap index pembangunan manusia menunjukkan bahwa terjadi penguatan daya beli masyarakat pada kategori lower medium. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

pokok cukup tinggi. Daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit human development index. Strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat yaitu, pemerintah perlu menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga ketersediannya di pasar maupun gudang dalam bentuk cadangan atau persediaan sehingga menunjukkan masalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk dapat mencapai atau mendapatkan kebutuhan dasarnya yang seharusnya menjadi haknya sebagai manusia dan sebagai warga negara telah terpenuhi (Zamharir, 2016).

### **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Inflasi dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi**

Pada hasil penelitian diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh variabel pengeluaran pemerintah, inflasi dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh variabel pengeluaran pemerintah, inflasi dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sehingga IPM juga akan meningkat. Tetapi pada penelitian ini pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi karena naiknya pertumbuhan ekonomi tidak membuat naiknya kapasitas produksi baru yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga pendapatan perkapita masyarakat tidak meningkat, pengangguran meningkat, inflasi meningkat dan kemiskinan meningkat yang pada akhirnya tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap IPM.

### **KESIMPULAN**

#### **Kesimpulan**

1. Dari hasil uji F, disimpulkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Inflasi dan Kemiskinan selama periode 2000 sampai dengan 2019 berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Indeks Pembangunan di Indonesia pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis penelitian diterima.
2. Berdasarkan uji parsial (uji t), variabel Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi berpengaruh nyata secara parsial sedangkan variabel Kemiskinan tidak berpengaruh nyata terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dengan pengujian pada tingkat kepercayaan 95 % ( $\alpha = 5\%$ ).
3. Variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Inflasi dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia
4. Nilai koefisien determinasi (R) sebesar 0,704 yang berarti bahwa variabel X1 (Pertumbuhan Ekonomi), X2 (Inflasi) dan X3 (Kemiskinan) secara bersama-sama mampu memberikan penjelasan variasi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia sebesar 70,4 % sedangkan sisanya 29,6 % dijelaskan oleh variabel baru yang tidak disertakan dalam estimasi model.

#### **Saran**

1. Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang Indeks Pembangunan Manusia disarankan dapat menambah variabel-variabel lainnya terhadap Variabel Ekonomi Makro seperti Ekspor, Impor dan Pengangguran.
2. Peneliti hanya menggunakan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependen, padahal mungkin saja ada variabel lain yang dapat dipengaruhi oleh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Inflasi, Kemiskinan ataupun juga mungkin ada variabel lain yang berada diantara variabel independen dan dependen (variabel

- antara). Dan jika variabel antara tersebut dimasukkan dalam model penelitian, mungkin akan memberikan hasil yang lebih komprehensif.
3. Karena variabel makroekonomi terbukti berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia maka perlu adanya upaya dari pemerintah dan otoritas moneter untuk menjaga kestabilan variabel makroekonomi tersebut supaya indeks pembangunan manusia sesuai dengan yang diharapkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cetakan Keempat Belas.Jakarta: Rineka Cipta.
- Astri, Meylina. 2012. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia.Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol 1 No.1.
- Andri Nurmalita Suryandari. (2017). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2014*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Cliff Laisina, Vecky Masinambow, Wensy Rompas.(2015). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Pdrb Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara Tahun 2002-20013*.Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.Volume 15 No. 04 Tahun 2015.
- David Rahmat dan Nasri Bachtiar.(2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Barat*.Universitas Andalas Padang.
- Ghozalo, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.Semarang : UNDIP
- Fahmi, Agus H. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Tahun 2011-2015.Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia
- Indah PangestiRudy Susanto (2018). *Pengaruh Inflasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Indonesia*.Journal Of Applied Business And Economics Vol. 5 No. 1 (Sept 2018) 70-81
- Kanbur, Ravi dan Lyn Squire(1999), *The Evolution of Thinking about Poverty: Exploring The Interactions*. <http://kanbur.dyson.cornell.edu/papers.htm>.
- Kuncoro, M. (2006).*Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Lanjouw. 2001. *Poverty, Education and health in Indonesia. Who Benefits from public spending?*. World Bank Working Paper No.2379. Washington D.C: World Bank. Diakses dari <http://papers.ssrn.com>.
- Manik, Tumpal.(2013). Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi, Invergovermental Revenue dan Kemiskinan Terhadap Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi.Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol.9. No. 2 September 2013.
- Maulida Astuti.(2018). *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016*. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- Merang Kahang, dkk. (2016). *Pengaruh Pengeluaran Pemerrintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal

- Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Volume, 118, (2), 2016. ISSN print: 1411-1713, ISSN online: 2528-150X.
- Mirza, D, S. (2012), —*Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah, Journal Of Economics And Policy* Vol.4, No.2
- Pangesti, Indah & Susanto, Rudy.(2018). Pengaruh Inflasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. *Journal of Applied Business and Economics* Vol.5 No.1
- Rizki Nurfadhli .(2017).*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Pulau Sumatera Periode Tahun 2010-2015*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Siti Nur Fatimah. (2018). *Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2010-2015*. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia
- Sukirno, Sadono. (2010). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta : Kencana Prenada Media grup
- Suryawati, C. (2005). *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. JMPK.Vol08/No03/ September/2005.
- Susanti, Hera. 2000. *Indikator-indikator Makro Ekonomi*. Jakarata: LPFE-UI.
- Zamharir, Amirul. (2016). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB Perkapita dan Upah Minimum Terhadap Human Development Index : Studi Kasus 12 Provinsi Dengan Kategori Lower Medium Di Indonesia*.